

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN  
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU  
(STUDI KASUS PAPAN REKLAME DI JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG  
KOTA PEKANBARU**

Oleh : **Vikha Octafiola/ 1301156684**

([Vikhaoctafiola31@gmail.com](mailto:Vikhaoctafiola31@gmail.com))

**Pembimbing: Abdul Sadad, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax 0761-63272

**ABSTRACT**

**VIKHA OCTAFIOLA, 1301156684. Implementation of Mayor of Pekanbaru Regulation No. 24 of 2013 on the Implementation of Advertising In Pekanbaru City (Case Studies Bulletin Board At the Crossing Crossroads of Pekanbaru City). Guided by Mr. Abdul Sadad.**

*The placement of billboards has a major influence on urban life because the billboard media is often the place where information can be delivered effectively. The reality of billboards in JPO is very disturbing for users of pedestrian bridges because of the large billboards that are not in accordance with the less well maintained JPO Pekanbaru.*

*This study aims to determine the Implementation of Mayor Regulation Pekanbaru Number 24 of 2013 on the Implementation of Reklame In Pekanbaru City (Case Studies Bulletin Board At the Crossing Crossroads of Pekanbaru City). Theoretical concept of the researcher is the implementation of the policy by using the Mazmanian and Sabatier theory by looking at the data obtained will be discussed thoroughly based on the fact that the institution or research office is implemented. Then compared with the concept and theory that support. The research method used is qualitative research with descriptive data assessment. In the data collection, researchers used interview techniques, observations, and documentation set based on Snowball sampling.*

*Based on the results of research show that not yet opimal this is seen there are deficiencies, there are many billboards that pairs in JPO that JPO own conditions are not good and many are not feasible and JPO development is not in accordance with the criteria. The factors that influence this research are poor communication, lack of public participation and attitude of executor.*

**Keywords: Implementation, Policy, People Crossing Bridge**

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pergerakan pejalan kaki meliputi pergerakan-pergerakan menyusuri jalan, memotong jalan dan persimpangan. Sebagaimana yang lazim terjadi di berbagai kota besar, karena tuntutan perkembangan ekonomi, perdagangan dan kemudahan jangkauan pelayanan bagi masyarakat, maka fasilitas-fasilitas umum seperti hotel, pertokoan dan lain sebagainya biasanya mengelompok pada suatu daerah tertentu, karena letak gedung satu dengan gedung yang lain menyebar ke seluruh kawasan, maka suatu ketika pejalan kaki harus menyeberangi lalu lintas kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan. Namun sering kali keberadaan penyeberang jalan tersebut pada tingkat tertentu akan mengakibatkan konflik yang tajam dengan arus kendaraan yang berakibat pada tundaan lalu lintas dan tingginya tingkat kecelakaan.

Seperti halnya di Kota Pekanbaru dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, penyediaan sarana transportasi bagi pejalan kaki seperti jembatan penyeberangan sudah mulai disediakan di beberapa titik lokasi padat lalu lintas. Penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dimaksudkan untuk mempermudah pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan nyaman dan aman.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 pada Bab V pasal 11 yang menjelaskan bahwa “Jembatan Penyeberangan Orang dapat dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila fasilitas penyeberangan dengan menggunakan *zebra cross* dan pelikan *cross* sudah mengganggu lalu lintas yang ada.
2. Pada ruas jalan dimana frekuensi terjadi kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki cukup tinggi.
3. Pada ruas jalan mempunyai arus lalu lintas pejalan kaki yang tinggi, serta arus kendaraan memiliki kecepatan tinggi.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tersebut dirasa kurang berjalan dengan baik dalam memecahkan permasalahan sirkulasi antara pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan kendaraan. Hal ini bisa dilihat pada kenyataannya bahwa jembatan penyeberangan sebagai salah satu fasilitas penyeberangan jarang dipakai dan terkadang sering disalah fungsikan bukan lagi untuk penyeberangan pejalan kaki tetapi lebih untuk mempromosikan papan reklame.

Fungsi dari ketersediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) untuk pejalan kaki agar dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan kepada pejalan kaki dan pengguna ruas jalan lainnya agar tidak terjadi kecelakaan antara arus pejalan kaki yang menyeberang dengan arus kendaraan lalu lintas yang melintas agar tidak terjadi kecelakaan yang menimpa pejalan kaki.

Peningkatan fasilitas umum merupakan suatu bentuk akibat adanya perkembangan wilayah dan kota seperti ketersediaan sarana dan prasarana umum yang penting untuk ditingkatkan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa modern yang saat ini.

Jembatan penyeberangan orang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari jembatan penyeberangan orang, lebih cepat sampai keseberang jalan tanpa harus menunggu jalan raya sepi oleh kendaraan terlebih dahulu, lebih aman sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas, dan mengurangi kemacetan di jalan raya ketika mengemudi. Sedangkan dampak negatifnya, akan merasa kelelah karena harus menaiki anak tangga yang banyak, kerap terjadi tindakan kriminal, seperti pencopetan dan hipnotis, kondisi jembatan yang kurang terawat dan kotor sehingga membuat para pengguna jembatan

penyeberangan kurang nyaman saat melewatinya, penyalahgunaan pemanfaatan jembatan, seperti dijadikan tempat pacaran, tempat mencari nafkah bagi pengemis, dijadikan sebagai tempat promosi barang dagangan seperti pasang iklan disisi jembatan, dijadikan tempat media kampanye para calon wakil rakyat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti memandang perlu untuk mengadakan penelitian tentang “ **IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PAPAN REKLAME DI JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG KOTA PEKANBARU)** ”

### **1.1 Rumusan Masalah**

Dengan melihat fenomena di lapangan, dirumuskan permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana implementasi peraturan wali kota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru (studi kasus papan reklame di jembatan penyeberangan orang kota pekanbaru)?
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan wali kota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru (studi kasus papan reklame di jembatan penyeberangan orang kota pekanbaru)?

### **1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana implementasi peraturan wali kota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru (studi kasus papan reklame di jembatan penyeberangan orang kota pekanbaru).

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan wali kota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru (studi kasus papan reklame di jembatan penyeberangan orang kota pekanbaru).

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian mengenai implementasi peraturan wali kota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru (studi kasus papan reklame di jembatan penyeberangan orang kota pekanbaru). Agar dapat memberikan gambaran mengenai papan reklame di Jembatan Penyeberang Orang (JPO) Kota Pekanbaru.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan bisa sebagai acuan didalam penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian yang akan dilakukan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan atas pembuatan jembatan penyeberangan orang oleh pihak swasta.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru.

### **1.3 Konsep Teori**

#### **1.3.1 Kebijakan**

Menurut **Suharto (2008:3)** kebijakan adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *government* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Menurut **Dunn (2003:39)** bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

#### **1.4.2 Implementasi kebijakan**

Implementasi adalah suatu proses dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang akan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan yang diinginkan (**Nugroho, 2003:158**).

Menurut **Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983)** yang mengemukakan tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik dari masalah (*Trackability of the problem*), sebuah karakteristik kebijakan (*Ability of statute to structure implementation*) dan lingkungan kebijakan (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*) dalam (**Subarsono 2005:94**):

1. Karakteristik masalah
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Dipihak lain terdapat masalah-masalah social yang relatif sulit dipecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu diimplementasikan.
  - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti suatu program akan relatif

mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda-beda.

- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.
  - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
2. Karakteristik kebijakan
    - a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan kebijakan ini merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
    - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dukungan teoritis. Kebijakan memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa

- lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi
- c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
  - d. Seberapa besar ada keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan sebuah program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
  - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksanaan.
  - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat dalam melaksanakan tugas pekerjaan atau program-program.
  - g. Seberapa luas akses kelompok di luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya akan relatif mendapatkan dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.
3. Lingkungan kebijakan
    - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi sebuah program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
    - b. Dukungan publik terhadap kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.
    - c. Sikap dari kelompok pemilih (constituent groups). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain: 1) kelompok pemilih dapat melakukan investasi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja yang dijalankan oleh badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.

- d. Tingkat komitmen keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat dari badan-badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

### **3.1.1 Karakteristik Masalah (*Trachbality of the problem*)**

- a. Kesulitan masalah dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Nomor 24 tahun 2013

Tingkat kesulitan masalah dalam implementasi penyelenggaraan papan reklame di JPO adalah, kurangnya kesadaran dari pihak pembuat kebijakan, bahwa papan reklame di JPO ini sangat mengganggu dan meresahkan pengguna JPO, bahkan kendaraan yang lalu lalang dibawahnya. Memang dengan adanya papan reklame ini menambah PAD tatapi bila dilihat dari segi negatifnya papan reklame yang berlebihan di JPO ini merugikan keselamatan masyarakat.

- b. Sasaran pihak yang bersangkutan dalam menangani papan reklame di JPO

Dari kelompok sasaran seperti, Dispenda dan Dishub. Dispenda sendiri memiliki kewenangan dalam menangani izin dan pajak papan reklame di JPO. Sementara Dishub mempunyai cara sendiri dalam mengontrol papan reklame dan menata letak papan reklame tersebut. Dari pihak-pihak ini sendiri mempunyai cara tersendiri dalam menangani kebijakan tersebut agar mencapai tujuan yang diinginkan.

- c. Cakupan perubahan dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 24 tahun 2013

Adanya kebijakan terhadap pemasangan papan reklame di JPO Kota Pekanbaru diharapkan oleh masyarakat akan lebih mengerti dalam memahami arti kebijakan tersebut, adanya kebijakan pemasangan papan reklame di JPO diharapkan adanya koordinasi antara DISPENDA Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru. Hal ini dimaksud agar terjadinya kerjasama yang baik antar dinas/instansi terhadap penyelenggaraan implementasi papan reklame di JPO dikota Pekanbaru.

### **3.1.2 Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang (*Ability Of State To Structure Implementation*)**

- a. Kejelasan isi kebijakan

Sebuah kebijakan yang telah jelas dan rinci akan lebih mudah untuk diimplementasikan agar implementordapat dengan mudah memahami. Dalam mengimpemaskan papan reklame di JPO Kota Pekanbaru seharusnya memiliki kebijakan yang jelas agar masyarakat dapat mengerti akan kebijakan tersebut. Karena peneliti melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengerti dengan adanya kebijakan papan reklame.

- b. Dukungan teoritis dalam kebijakan.

Dengan adanya dukungan Peraturan Wali Kota yang telah menjelaskan arutaran dalam pemasangan papan reklame di JPO sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam memahami Peraturan Wali Wota tentang penyelenggaraan reklame tersebut, karena implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

- c. Ketepatan alokasi sumberdaya

Semakin banyak pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan ini, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan dalam operasional pengawasan dan penertiban papan reklame di JPO Kota Pekanbaru. Dengan itu diharapkan kepada pemasang papan reklame atau konsumen periklanan agar membayar pajak tetap waktu dan mengikuti ketentuan yang berlaku agar tidak adanya kesalahpahaman dalam menyelenggarakan papan reklame di JPO Kota Pekanbaru.

- d. Komitmen instansi terhadap tujuan kebijakan.

Kerjasama antara pihak satu dan lainnya dapat melihat langsung kelapangan atau patrol diarea-area JPO sehingga jika melihat papan reklame yang illegal atau habis masa pakainya dapat langsung dilepas yang mengganggu kenyamanan pengguna JPO di Kota Pekanbaru.

### **3.1.3 Lingkungan kebijakan**

- a. Kondisi sosial dan teknologi.

Dengan bertambah majunya teknologi, maka bertambah banyaknya media informasi bagi masyarakat. JPO adalah salah satu tempat sumber informasi bagi masyarakat yang bisa diakses secara tidak langsung. Akan tetapi papan reklame yang terpasang di JPO pada saat ini pemasangannya sangat membahayakan pengguna dan arus lalu lintas dibawahnya.

- b. Dukungan publik terhadap kebijakan

Pemasangan papan reklame pada JPO dengan ketentuan yang telah berlaku tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat, karena dapat menambah informasi tetapi jika pemasangan papan reklame tidak memperhatikan keselamatan masyarakat maka akan membahayakan pengguna JPO tersebut.

- c. Komitmen keterampilan dari aparat dan implementor.

Dengan adanya pembagian tugas masing-masing pihak diharapkan kebijakan tetap berjalan secara terus menerus agar JPO difungsikan sesuai dengan fungsinya dan tetap membuat pengguna aman dalam menggunakan JPO.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan (**Sugiyono, 2006:11**). Pada penelitian ini realita yang ada dilapangan dijelaskan beberapa fenomena-fenomena yang ada kaitanya dengan penelitian dengan alasan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dijadikan dasar untuk mendiskripsikan.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Jembatan Penyeberangan Orang yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

### **1.7.3 Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam melakukan informan selanjutnya menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi untuk mengetahui tentang implementasi peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) (studi kasus jembatan penyeberangan orang di kota pekanbaru). Adapun informen yang dianggap mengetahui dengan mendalam serta dapat memberikan keterangan terhadap Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Papan

Reklame Di Jembatan penyeberangan Orang Kota Pekanbaru) adalah:

1. Kasi Prasarana Fasilitas Lain Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
2. Kepala Sub Bidang Pajak Reklame, Air Tanah, Penerangan Jalan dan Mineral, Bukan Logam Batuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
3. 2 Orang masyarakat.

#### **1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data**

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap (Prasetyo Irawan, 2004:84). Jenis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara, serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara sehubungan dengan implementasi peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru (studi kasus papan reklame di Jembatan penyeberangan Orang Kota Pekanbaru).
2. Data Sekunder data yang diperoleh dari laporan instansi dan keterangan lainnya yang mendukung penelitian ini. Di antaranya adalah:
  1. Buku
  2. Jurnal
  3. Peraturan Wali Kota
  4. Sumber data dari pihak terkait

#### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka di dalam penulisan ini penulis memakai metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat beberapa hal-hal penting yang berhubungan dengan mekanisme dan pengawasan. Observasi tidak langsung dilakukan dengan pengumpulan dokumen, catatan dan arsip yang terkait dengan sampel penelitian. Adapun yang diobservasi dalam penelitian ini yaitu: DISPENDA dan DISHUB.

##### **2. Wawancara**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada informan yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang objek penelitian secara langsung dari kata-kata informen.

##### **3. Dokumentasi**

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap implementasi peraturan Wali Kota Pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota pekanbaru (studi kasus papan reklame di Jembatan penyeberangan Orang Kota Pekanbaru).

#### **1.7.6 Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi instansi atau kantor penelitian dilaksanakan. Kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang

mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik Triangulasi.

Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check*, *re-check* dan *crosscheck* antara materi atau data dengan observasi penelitian dilapangan, yang seharusnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 24 tahun 2013

Dalam studi kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk suatu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, artinya menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar.

Pada tataran implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dari birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam pengimplementasiannya karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Tetapi, asumsi ini bukan untuk menegaskan bahwa semua kebijakan sulit untuk diimplementasikan sebab ada kebijakan yang udah diimplementasikan.

Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Wali Kota tentang penyelenggaraan reklame yaitu:

#### 3.2.1 Komunikasi yang kurang baik

Komunikasi adalah instrumen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kontak dengan orang lain karena komunikasi dilakukan oleh seseorang setiap hari baik disadari maupun tidak. Komunikasi adalah faktor yang penting yang digunakan dalam menyampaikan kebijakan.

Namun seringkali informasi yang seharusnya sampai kepada orang yang membutuhkan, ternyata terputus ditengah jalan akibat tidak efektifnya suatu komunikasi yang dilakukan. Komunikasi yang tidak efektif juga dapat disebabkan kegagalan pada proses komunikasi itu sendiri.

Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan papan reklame ini sering terjadi *miss communication* antara pihak terkait.

#### 3.2.2 Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan suatu konsep yang luas dan penting. Karena salah satu indikator keberhasilan suatu kebijakan adalah partisipasi masyarakat sebagai penerima kebijakan. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia. Dengan kata lain, partisipasi dalam suatu kebijakan publik selalu berkaitan dengan masyarakat sebagai objek yang dituju dari suatu kebijakan, karena kebijakan itu dilahirkan dalam kerangka dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ini maka kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Tidak hanya itu saja kebijakan ini juga bertujuan untuk mewujudkan menertibkan papan reklame di JPO di kota Pekanbaru. Meskipun sejauh ini masyarakat sudah cukup berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan namun, tetap saja ada masyarakat yang tidak begitu tertarik dengan kebijakan ini.

Dengan adanya fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan serta saprodi (sarana dan prasarana produksi). Selain sumberdaya yang berupa staff pelaksana, dukungan fasilitas yang tidak kalah pentingnya adalah sumberdaya wewenang, sebab dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pelaksana dapat mengimplementasikan secara efektif. Para pelaksana merupakan faktor vital dalam implementasi kebijakan, Karena apapun jenis kebijakan pasti memerlukan dukungan staff atau para pelaksana yang memadai.

Memandai adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya dan keterampilan yang memiliki baik teknis maupun manajerial. Sumberdaya yang tidak kalah pentingnya dalam mengimplentasikan kebijakan adalah dukungan fasilitas. Ini berhubung dengan sumberdaya berupa dana atau financial yang akan memperlancar proses implementasi.

Untuk memperlancar kegiatan DISPENDA di Kota Pekanbaru, kondisi sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan optimal pelayanan minimal dibidang penertiban. Kondisi sarana dan prasarana cukup baik, tetapi untuk kantor belum maksimal.

### **3.2.3 Sikap Pelaksana**

Arahan respon para pelaksana lapangan ini berhubungan dengan beban tugas yang diberikan oleh pembuat kebijakan. Sebagai pembuat kebijakan harus mengetahui dan memahami kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana lapangan. Jika beban itu diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan, maka ini akan mengakibatkan adanya rasa penolakan terhadap tugas yang diberikan. Disamping itu juga para pembuat kebijakan harus dapat memberikan intensive atau rangsangan kepada para pelaksana kebijakan. Jadi tidak hanya yang diberikan, tetapi keperluan para pelaksana dilapangan juga harus diperhatikan. Sebab adanya rangsangan tidak mungkin merka akan bekerja sebagaimana mestinya. Ini sesuai dengan kodrat manusia yang mempunyai keinginan dan kebutuhan.

Dengan adanya insentive akan terdorong untuk melaksanakan program. Para pelaksana pada dasarnya merupakan bagian dari para pembuat kebijakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksana program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup untuk memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka

mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Pengetahuan dan pemahaman pelaksana baik sebagai pembuat program tingkat lokal maupun pelaksana dilapangan harus ditingkatkan, sebab dengan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap program pelaksana dilapangan dengan mudah memberikan penyuluhan kelompok sasaran. Hal ini tentu dengan informasi yang jelas. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu para pelaksana akan diberi pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas yang akan dilakukan. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana tidak sepenuhnya memahami tujuan dan harapan kebijakan atau para pelaksana mempunyai keinginan atau kepentingan yang sama sekali berbeda dengan tujuan kebijakan. Namun akan terjadi sebaliknya, para pelaksana untuk merima tujuan program akan memberikan potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi

Sebagai pelaksan dalam mengimplementasikan penyelenggaraan papan reklame di JPO kota Pekanbaru, para pelaksana memberikan arah respon yang cukup baik dalam melakukan penertiban papan reklame tersebut.

Dalam penyelenggaraan papan reklame di JPO Kota Pekanbaru ini para pelaksana memberikan motivasi kepada para anggota pelaksana itu sendiri yaitu dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah yang baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Sebaliknya untuk melakukan sesuatu tanpa adanya faktor dorongan insentif mungkin beberapa dari orang tersebut akan

mengerjakan tugas yang diberikan dengan kurang maksimal.

Asumsi ini memberikan gambaran atau mencerminkan tindakan seseorang. Atau sebaliknya bahwa tindakan seseorang bukan gambaran semata-mata dari perilaku seseorang. Jadi, seseorang bertindak atau berperilaku disebabkan oleh faktor yang ada diluar dirinya.

Faktor dari dalam diri seseorang melakukan tindakan adalah suatu dorongan atau motivasi psikologi atau rasa tanggung jawab karena tugas dan wewenang telah diberikan kepadanya. Sedangkan faktor diluar dirinya adalah seperti kebutuhan ekonomi, politik, jabatan dan kedudukan, dorongan social dan sebagainya.

Penjelasan dari anggota DISPENDA tersebut menunjukkan bahwa diantara atasan dan bawahan itu saling berkomunikasi dengan baik, dapat memberikan motivasi agar bawahan dapat bekerja dengan lebih baik.

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti dari uraian bab-bab sebelumnya mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Papan Reklame Di Jembatan penyeberangan Orang Kota Pekanbaru) maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Papan Reklame Di Jembatan penyeberangan Orang Kota Pekanbaru) yang dilakukan oleh pihak DISPENDA belum berjalan secara optimal dibuktikan dalam tiga kelompok variabel yaitu:
  - a. Karakteristik masalah.

Masih banyak papan reklame yang ada di Jembatan Penyeberangan Orang yang masih kokoh, sementara JPO sendiri sudah banyak mengalami kerusakan. Banyaknya papan reklame yang berdiri di bagian atas Jembatan Penyeberangan Orang yang meresahkan masyarakat. Tetapi papan reklame tersebut menambah Pendapatan Daerah.

- b. Karakteristik kebijakan.  
Standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Jika tidak ada jelasan dan konsistensi terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan maka menjadi kebijakan yang sulit untuk dicapai.
  - c. Lingkungan kebijakan  
Lingkungan kebijakan tidak hanya bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut.
2. Faktor-faktor yang menghambat proses Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Papan Reklame Di Jembatan Penyeberangan Orang Kota Pekanbaru) adalah, kurangnya komunikasi antar pihak terkait yang belum maksimal. Kurangnya komunikasi antara pemilik reklame sehingga masa izin dan pajak akhir berlakunya reklame tersebut dan hal ini juga akan menimbulkan kecurangan-kecurangan yang bisa diambil oleh pihak yang tidak

bertanggung jawab. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melihat kebijakan yang sudah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan JPO sesuai peruntukannya. Sikap pelaksana yang kurang optimal karena masih banyak yang melanggar atau yang tidak mengetahui kebijakan yang telah dibuat, kurangnya kesadaran dalam mengimplemmentasikan Perwako ini.

## 4.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Papan Reklame Di Jembatan Penyeberangan Orang Kota Pekanbaru), penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Lebih ditingkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi yang terkait terhadap papan reklame yang ada di JPO, serta lebih peka terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melanggar ketentuan-ketentuan operasional dilapangan.
2. Melakukan evaluasi terhadap kecurangan-kecurangan pada opnum-opnum yang tidak bertanggung jawab, terhadap kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam penertiban papan reklame di JPO tersebut. Melakukan pendataan terhadap pemilik reklame yang melanggar ketentuan yang ada. Agar meningkatkan komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait. Dapat melakukan tugas dan fungsinya lebih optimal. Memperhatikan operasional tempat pemasangan papan reklame di Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian, Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Perberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Belajar. Pekanbaru.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta University press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya:MN.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Kebijakan Publik (Formulasi, implementasi dan Evaluai)*. Grasindo. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Prasetya, Irawan. 2006. *Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Self Press : Jakarta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabet. Bandung.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Teori Aplikasinya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sinambela, LijanPoltak. 2008. *Reformasi Pelayan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Supriady Koswara, Edy. dkk. 2014. *Efektifitas Penggunaan Fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang*. Dalam Jurnal Kalibrasi. Sekolah Tinggi Teknologi Garut.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik; Konsep dan Perkembangan Ilmu Di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Surmaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama. Jakarta.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Lukman Offset. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Keimplementasian Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Public*. Bayu Media Publishing. Sidoarjo.
- Widjaya, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Persisndo. Yogyakarta.
- Winarto, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :teori dan proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.

### Skripsi

Septian Arafat Saragih, Loyal. 2015. Implementasi Penertiban Reklame di Kota Dumai

### Sumber lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17  
Tahun 2007.  
Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24  
Tahun 2013.  
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  
04 Tahun 2011

**Internet**

([http://faderafa16.blogspot.co.id/2013/01/s  
tatistik-jembatan-  
penyeberangan.html?m=1](http://faderafa16.blogspot.co.id/2013/01/statistik-jembatan-penyeberangan.html?m=1))

([http://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan\\_pe  
nyeberangan\\_orang](http://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan_penyeberangan_orang))

([http://nurfauziashari1ea06.blogspot.co.id/  
2014/05/pengaruh-jembatan-  
orang-jpo.html?m=1](http://nurfauziashari1ea06.blogspot.co.id/2014/05/pengaruh-jembatan-orang-jpo.html?m=1))